



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Evaluasi Program PAUD Sanggar Cerdas Elina di Kelurahan
Kedaung, Kota Tangerang Selatan**

Skripsi
Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh
Denny Andrian
2012310071

Bandung
2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Evaluasi Program PAUD Sanggar Cerdas Elina di Kelurahan
Kedaung, Kota Tangerang Selatan**

Skripsi

Oleh

Denny Andrian

2012310071

Pembimbing

Bandung
2018

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Abstract.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Singkatan.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Diagram.....	viii
 BAB I.....	 1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Kegunaan Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Pembahasan	14
 BAB II.....	 15
KERANGKA PEMIKIRAN.....	15
2.1 Administrasi Publik.....	15
2.2 Apa itu Lembaga Swadaya Masyarakat / NGO?	18
2.2.1 Peran dan Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat	19
2.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Lembaga Swadaya Masyarakat	21
2.3 Konsep Pembangunan	23
2.3.1 Partisipasi Masyarakat dan NGO/LSM.....	25
2.4 Pembangunan Pendidikan dalam MDGs dan SDGs	26
2.5 Pembangunan Pendidikan di Indonesia.....	27
2.6 Teori Evaluasi Program.....	31
2.7 Model Penelitian	34
2.8 Operasional Variabel.....	35
2.8.1 Indikator Implementasi Kebijakan	36
 BAB III	 40
METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Tipe Penelitian.....	40
3.2 Peran Peneliti.....	41
3.3 Lokasi Penelitian	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data	42
3.5 Analisis Data	43
3.6 Validitas Data.....	44
 BAB IV	 46

PROFIL PENELITIAN	46
4.1 Profil Sanggar Cerdas Elina	46
4.2 Tugas Pokok Sanggar Cerdas Elina	46
4.3 Dasar Hukum Sanggar Cerdas Elina	47
4.4 Visi dan Misi Sanggar Cerdas Elina	48
4.5 Struktur Organisasi.....	49
4.6 Spesifikasi Lokasi PAUD Sanggar Cerdas Elina.....	51
4.7 Profil Yayasan Prima Konsep Indonesia.....	51
4.8 Tugas Pokok Yayasan Prima Konsep Indonesia.....	51
4.9 Dasar Hukum Yayasan Prima Konsep Indonesia	52
4.9.1 Visi dan Misi Yayasan Prima Konsep Indonesia	53
4.10 Struktur Organisasi.....	54
4.11 Spesifikasi Lokasi Yayasan Prima Konsep Indonesia	54
BAB V	55
EVALUASI PROGRAM PAUD SANGGAR CERDAS ELINA PAUD DI TANGERANG SELATAN	55
5.1 Analisa Konteks	55
5.2 Analisa Input	59
5.3 Analisa Kegiatan	69
5.4 Analisa Output.....	87
BAB VI	99
KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
6.1 Kesimpulan.....	99
6.2 Saran.....	103
6.3 Kesimpulan Umum	106
6.4 Saran Umum.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
DAFTAR LAMPIRAN.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan hal yang penting bagi setiap Negara, pembangunan di setiap Negara dilatar belakangi oleh adanya Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dikeluarkan oleh *United Nations* (UN). MDGs dan SDGs adalah bentuk kerjasama global untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan bersama. MDGs dan SDGs sendiri merupakan sebuah program pembangunan dengan jangka waktu 15 tahun. MDGs diadopsi oleh UN pada tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2015.¹ MDGs berisikan 8 tujuan yaitu mengurangi kemiskinan dalam berbagai dimensi, mengurangi kelaparan, penyakit dan kurangnya penampungan layak. MDGs juga mempromosikan kesetaraan gender, edukasi dan *environmental sustainability*.

Aspek – aspek tersebut merupakan hak dasar setiap manusia untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, perlindungan dan keamanan. MDGs mampu mencapai kesuksesan meskipun belum sepenuhnya, tetapi dengan keberadaan MDGs, negara-negara meningkatkan perbaikan di dalam negaranya. Menurut laporan MDGs 2015 yang dikeluarkan oleh UN, MDGs telah berhasil memperbaiki hal-hal yang ada di dalam tujuannya.² MDGs dilanjutkan dengan SDGs tahun 2016 – 2030 yang tujuannya³ :

¹ Sustainabledevelopment.un.org. (2018). *Home.:Sustainable Development Knowledge Platform*. Dapat diakses pada: <https://sustainabledevelopment.un.org/> [Diakses pada tanggal 20 Apr. 2017]

² The Millennium Development Goals Report. (2011). New York: United Nations, hal 4 – 8. Dapat diakses pada

1. Menghapuskan segala bentuk kemiskinan
2. Menghapuskan kelaparan, mencapai keamanan pangan dan meningkatkan nutrisi serta mempromosikan agrikultur berkelanjutan
3. Menjamin hidup yang sehat dan kesejahteraan bagi semua usia
4. Menjamin inklusifitas dan pemerataan kualitas pendidikan dan mempromosikan kesempatan belajar bagi semua orang
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan
6. Menjamin ketersediaan dan keberlanjutan manajemen air dan sanitasi
7. Akses energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan moderen bagi semua
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, inklusif dan produktif serta pekerjaan layak bagi semua
9. Membangun infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi dan mendorong inovasi
10. Mengurangi ketidaksamarataan di dalam dan antara negara – negara
11. Membuat kota dan pemukiman inklusif, aman, kuat dan berkelanjutan
12. Menjamin konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim beserta dampaknya
14. Menghemat dan secara berkelanjutan menggunakan lautan dan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan

[http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/\(2011_E\)%20MDG%20Report%202011_Book%20LR.pdf](http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/(2011_E)%20MDG%20Report%202011_Book%20LR.pdf) [Diakses pada tanggal 20 Apr. 2017].

³ United Nations (2016). *THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT*. SDGs Adaptation Report. Sierra Leone: United Nations, hal.29 - 39.

15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif.
17. Memperkuat tujuan implementasi dan revitalisasi dari kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan

SDGs memiliki 17 tujuan atau poin. Banyaknya tujuan ini didorong oleh keinginan negara-negara dalam mengembangkan dunia dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi dunia bersama seperti salah satunya adalah terkait isu pemanasan global yang tentunya dihadapi oleh semua negara. Secara tidak langsung SDGs menjadi pedoman bagi negara-negara dalam melakukan pembangunan. Pembangunan pendidikan menjadi perhatian bagi *United Nations* dan Negara – negara di dunia karena dengan pendidikan, setiap individu dapat membawa Negara dan masyarakat tempat ia berada menjadi lebih maju. Yang akan kita bahas dalam penelitian ini adalah SDGs dengan tujuan keempat mengenai pendidikan.

Di Indonesia, program terkait pendidikan dikeluarkan oleh pemerintah beberapa diantaranya yang kita ketahui dan masih berlaku hingga saat ini adalah wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun, namun kewajiban belajar untuk anak usia dini atau PAUD masih belum ada regulasinya. SDGs menjelaskan bahwa usia dini

adalah *golden age* dimana anak – anak sedang berkembang dan pendidikan dasar penting untuk diajarkan. Keadaan PAUD di Indonesia sebenarnya tergolong cukup, sesuai dengan data yang diperoleh dari Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 – 2019, PAUD telah berkembang dilihat dari tahun 2010 – 2014.

Melihat keadaan pendidikan di Indonesia, banyak lembaga swadaya masyarakat yang turut serta membantu pemerintah untuk mengembangkan sektor pendidikan. Dalam penulisan ini, yang dibahas adalah pembangunan pendidikan yang secara khusus fokus pada pendidikan anak usia dini. PAUD sedikit luput dari perhatian masyarakat karena kurangnya kesadaran bahwa PAUD merupakan tahap penting dalam tumbuh kembang anak. Isu PAUD dapat diangkat kembali oleh LSM dengan menyadarkan masyarakat atas pentingnya PAUD.

Lembaga Swadaya Masyarakat sendiri merupakan badan yang bergerak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai aktor yang terlibat di dalam masyarakat, pemerintah mengakui keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Pemerintah Indonesia sendiri sudah mengakui keberadaan LSM yang dibahas di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam UU ini disebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dalam Bab 3 pasal 5 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2013 disebutkan bahwa ormas bertujuan untuk :

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat
7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
8. Mewujudkan tujuan negara.

Selanjutnya dalam pasal 6, disebutkan bahwa ormas berfungsi sebagai sarana :

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
3. Penyalur aspirasi masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat
5. Pemenuhan pelayanan sosial
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/ atau

7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Lalu dalam pasal 7, dijelaskan mengenai kegiatan Ormas sebagai berikut :

1. Ormas memiliki bidang kegiatan sesuai dengan AD/ART masing-masing.
2. Bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sifat, tujuan, dan fungsi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Dan dalam pasal 8, dijelaskan mengenai ruang lingkup Ormas, yaitu :

- a. Nasional;
- b. Provinsi; atau
- c. Kabupaten/kota.

Lembaga Swadaya Masyarakat berbeda dengan lembaga pemerintahan lainnya, mereka berdiri secara independen dan lepas dari kontrol pemerintah. Namun disisi lain, LSM tidak menantang pemerintah dan tidak mengutamakan profit. Dapat dikatakan bahwa LSM memiliki 5 dasar karakteristik yaitu non-pemerintah, sukarela, non-komersil, akuntabel dan non-politik.⁴

Peran lembaga swadaya masyarakat yang merupakan pembantu pemerintah adalah sebagai penyeimbang antara kebijakan – kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan masyarakat. LSM dapat mempengaruhi

⁴ Rahman M, *Management of NGOs: A Study in SAARC Countries*, Ph. D. dissertation. (2003) Karachi : University of Karachi. Dapat diakses di : <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/097206340700900205> hal 55 [Diakses pada tanggal 20 April 2016].

proses pembuatan keputusan pemerintah, sehingga keberadaan LSM didukung oleh masyarakat. LSM juga mampu mempengaruhi kebijakan yang akhirnya dikeluarkan oleh pemerintah. LSM berperan sebagai perantara aspirasi masyarakat supaya dapat disampaikan kepada pemerintah. LSM juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap suatu isu – isu yang dianggap penting.⁵

Dalam rangka mengembangkan pendidikan anak usia dini, yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah lingkungan masyarakat yang ingin dikembangkan. Menurut artikel tulisan Jim Cavaye yang berjudul ‘*Understanding Community Development*’, pengembangan masyarakat dan partisipasi masyarakat saling berkaitan, dimana adanya keinginan untuk mengembangkan suatu kelompok masyarakat akan mendorong partisipasi anggota masyarakatnya untuk membangun kelompoknya.⁶ Pengertian dari pengembangan masyarakat sendiri menurut Adi Fahrudin adalah suatu penggunaan berbagai pendekatan dan teknik dalam suatu program tertentu pada masyarakat lokal sebagai kesatuan tindakan dan mengusahakan integrasi diantaranya bantuan yang berasal dari luar dengan keputusan dan upaya masyarakat yang terorganisir.⁷ Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengembangkan suatu masyarakat itu sendiri. Maka partisipasi masyarakat akan terwujud dengan cara masyarakat diberikan kebebasan untuk

⁵ Betsill, M. and Corell, E. (2001). NGO Influence in International Environmental Negotiations: A Framework for Analysis. *Global Environmental Politics*, [online] 1(4), hal.20 - 24. Available at: <http://www.web.cemus.se/wp-content/uploads/2018/01/Influence-of-NGO-diplomats-in-int.-negotiations.pdf> [Diakses pada tanggal 20 Apr. 2016].

⁶ Cavaye, Jim. ‘*Understanding Community Development*’. [ebook] hal 7. Dapat diakses di : http://vibrantcanada.ca/files/understanding_community_development.pdf [Diakses pada tanggal 11 Januari 2017]

⁷ Adi, F. (2011) *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung : Humaniora, hal 64.

berpartisipasi, kemampuan masyarakat berpartisipasi dan adanya peluang serta kesempatan untuk partisipasi.⁸ Seperti kondisi kesadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini yang dibangun karena adanya kebebasan LSM untuk berpartisipasi dalam memajukan pendidikan.

Melihat tidak adanya Undang – Undang yang secara khusus membahas mengenai pendidikan anak usia dini, maka masyarakat tidak menyadari pentingnya usia tumbuh kembang anak dibawah 6 tahun. Usia *golden age* atau keemasan dalam tumbuh kembang individu adalah pada usia 0 – 9 tahun. Menurut konvensi anak bahkan yang dianggap sebagai anak yaitu yang berusia 0 – 18 tahun. Sehingga seharusnya pendidikan dasar berlaku dari 0 – 18 tahun.⁹ Pada tahun 2017, Bapak Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam peraturan tersebut dituliskan bahwa sasaran global kedua dalam bidang pendidikan adalah pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki – laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Dan dalam sasaran nasional RPJMN 2015- 2019 bertujuan supaya meningkatkan APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2019 menjadi 77,2% dimana pada tahun 2015 adalah sebanyak 70,06%.¹⁰

⁸ Adi, F. (2011) *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung : Humaniora, hal 64.

⁹ Ibid

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan hal 26.

Yayasan Prima Konsep Indonesia sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, berupaya berperan untuk menghadapi permasalahan rendahnya partisipasi PAUD. Yayasan Prima Konsep Indonesia berupaya untuk meningkatkan pendidikan anak usia dini di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Menurut hasil wawancara dengan ketua Yayasan Prima Konsep Indonesia, kendala yang dihadapi terkait perubahan adalah kurang teraturnya sistem, peraturan pendidikan di Indonesia atau kebijakan dan kurangnya peran pemerintah sehingga kurangnya kesadaran dari masyarakat umum tentang PAUD. Perubahan dapat terjadi dengan adanya kemauan dan dorongan dari pihak yang ingin mengubah, disini Yayasan Prima Konsep Indonesia mendirikan Sanggar Cerdas Elina.

Yayasan Prima Konsep Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia hidup sejahtera lahir dan batin. Mereka juga bergerak dengan misi untuk¹¹ :

1. Membantu masyarakat mewujudkan kesejahteraan hidupnya dengan memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya melalui berbagai program kerja LSM Prima Konsep Indonesia bersama mitra kerja dan senantiasa menggunakan prinsip-prinsip pemberdayaan.
2. Melaksanakan program pendidikan, pemberdayaan ekonomi, perikanan, pertanian, kesehatan masyarakat dan lingkungan, dan kesejahteraan sosial dan budaya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

¹¹ Hasil Wawancara dengan pihak Yayasan Prima Konsep Indonesia, berdasarkan program kerja mereka.

3. Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan penelitian terhadap persoalan – persoalan, baik pendidikan, ekonomi, pertanian, perikanan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, kesejahteraan sosial, seni, budaya dan kesetaraan gender serta penegakkan HAM.

Dengan adanya visi dan misi ini, Yayasan Prima Konsep Indonesia memiliki keinginan untuk membantu masyarakat mewujudkan kesejahteraan dengan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki melalui program kerja mereka yaitu PAUD Sanggar Cerdas Elina. PAUD Sanggar Cerdas Elina terletak di Tangerang Selatan dan berdiri pada tanggal 20 Desember 2009. Alasan didirikannya PAUD Sanggar Cerdas Elina sendiri karena pendidikan anak usia dini merupakan hal fundamental dan penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul di masa yang akan datang.

Yayasan Prima Konsep Indonesia tidak berjuang sendirian dalam mengembangkan PAUD, karena pada dasarnya di tahun 2013 Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang bertujuan menjamin (a) terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur; serta (b) terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah dengan mendorong komitmen seluruh lapisan masyarakat di dalam

mengembangkan PAUD.¹² Tujuan umum dari pengembangan anak usia dini holistik-integratif adalah terselenggaranya layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Tujuan khusus pengembangan anak usia dini holistik-integratif adalah:

1. Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai segmentasi umur
2. Terlindunginya anak dari kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada
3. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah
4. Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan Pemerintah dalam upaya pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

Dengan adanya tujuan – tujuan ini yang dapat dijadikan sebagai panduan, maka perwujudan pengembangan PAUD akan lebih terarah. Selain itu prinsip – prinsip di dalam Peraturan ini adalah¹³ :

¹² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Dapat diakses di : Usia Dini Holistik – Integratif. https://www.banpaudpnf.or.id/upload/download-center/Perpres%20No.60%20Tahun%202013%20tentang%20PAUD%20Holistik%20Int_1508752939.pdf [Diakses pada tanggal 17 Maret 2017]

¹³ PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF. (2013). Power Point Data, Surabaya.

- Pelayanan yang menyeluruh dan terpadu
- Pelayanan yang berkesinambungan
- Pelayanan yang non diskriminasi
- Pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat
- Partisipasi masyarakat
- Berbasis budaya yang konstruktif
- Tata kelola pemerintahan yang baik.

Kebijakan pengembangan anak usia dini ini berarah kepada peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif. Lalu peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif. Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional juga menjadi arah dari kebijakan ini. Yang terakhir yaitu penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.¹⁴

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada evaluasi program pendidikan yang dilakukan oleh PAUD Sanggar Cerdas Elina dalam mengembangkan pendidikan anak usia dini di

¹⁴ PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF. (2013). Power Point Data, Surabaya.

Kelurahan Kedaung, Tangerang Selatan. Program pendidikan ini merupakan perwujudan poin keempat dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

- 1. Bagaimana konteks yang melatar belakangi PAUD Sanggar Cerdas Elina?**
- 2. Apa saja input dalam program Anak Usia Dini yang diberikan oleh PAUD Sanggar Cerdas Elina ?**
- 3. Bagaimana proses PAUD Sanggar Cerdas Elina dalam melaksanakan kegiatan?**
- 4. Bagaimana output dari kegiatan PAUD Sanggar Cerdas Elina?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program PAUD Sanggar Cerdas Elina. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi program dari Connel dan Kubis yang dimodifikasi oleh penulis. Dimana penulis meneliti 4 hal dari 5 yang disebutkan oleh Connel dan Kubis. Penulis meneliti program PAUD Sanggar Cerdas Elina dengan menjawab empat pertanyaan diatas, yaitu :

1. Mendeskripsikan konteks yang melatar belakangi PAUD Sanggar Cerdas Elina
2. Mendeskripsikan input dalam program PAUD yang diberikan oleh Sanggar Cerdas Elina
3. Mendeskripsikan proses pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan PAUD sanggar Cerdas Elina. Dalam melaksanakan kegiatannya

4. Mendeskripsikan output dari kegiatan PAUD Sanggar Cerdas Elina

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk membantu pembaca agar lebih memahami mengenai pembangunan berkelanjutan yang terjadi di Indonesia dengan adanya peranan dari organisasi non pemerintah. Bagaimana badan non pemerintah mengupayakan supaya masyarakat dan negaranya dapat berkembang dalam sektor sosial dan pendidikan. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat menambah pengetahuan pembaca dengan membahas isu pembangunan berkelanjutan khususnya PAUD di Indonesia.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membahas mengenai evaluasi program PAUD Sanggar Cerdas Elina dalam membantu pembangunan berkelanjutan khususnya dalam bidang pendidikan. Dalam rangka mengikuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Penelitian ini melihat lembaga swadaya masyarakat sebagai agen perubahan dalam masyarakat khususnya terkait dengan Pendidikan Anak Usia Dini, sistematika penulisan dalam penelitian ini tersusun dalam enam bab. Bab I Pendahuluan, Bab II Kerangka Pemikiran, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Objek Penelitian, Bab V Analisis, dan Bab VI adalah Kesimpulan dan Saran.